

BAB IV

KONSIDERASI KEBIJAKAN DONALD TRUMP

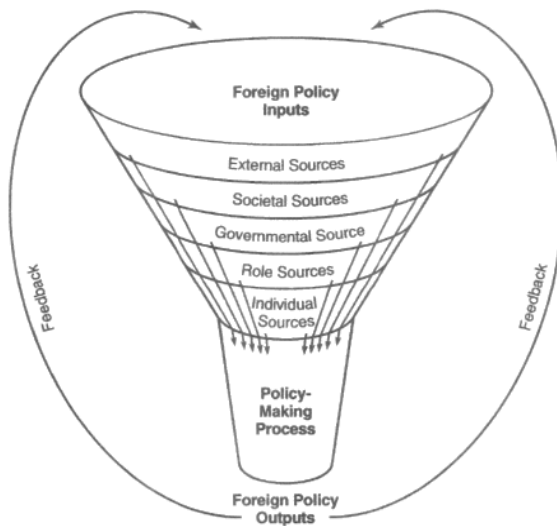
Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan mengenai apa yang menjadi penyebab serta dorongan utama mengapa Amerika Serikat mengambil kebijakan pemindahan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Setidaknya terdapat beberapa elemen-elemen penting yang bersifat fundamental yang menjadi bahan pertimbangan *Decision Maker* dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Beberapa elemen tersebut adalah kondisi politik domestik, kondisi militer dan ekonomi, serta konteks internasional di mana ketiganya menjadi sebab Amerika merumuskan kebijakan luar negerinya. Namun sebelum itu, peneliti juga menjabarkan tentang seluk-beluk dan pengaruhnya kelompok kepentingan atau individu dan kelompok pro-Israel di Amerika Serikat. Kemudian, pada bab ini, peneliti akan menjelaskan beberapa elemen tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga mendorong seorang kepala negara untuk mengambil satu kebijakan luar negeri.

A. Kondisi Politik Dalam Negeri Amerika Serikat dan Pengaruhnya

1. Kepentingan Kelompok Pro-Israel di Amerika Serikat

Di dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri, Amerika Serikat melibatkan berbagai sumber yang saling terkait antara satu sama lain dan hal ini yang menyebabkan pembuatan kebijakan luar negeri lebih bersifat kompleks seperti di dalam kerangka analisis seperti dibuat oleh Eugene yang dibagi menjadi *eksternal source*, *societal sources*, *governmental sources*, *role sources*, dan *individual sources* (Eugene R. Wittkopf, Chstophher M. Jones , 2003, p. 132).

***Bagan 4.1 Kerangka Analisis Proses Pengambil Kebijakan Publik
Oleh Eugene***



Sumber : Laporan L. Jalu Wicaksana

External Sources (Sumber Eksternal)

Sumber Eksternal diartikan sebagai pengaruh dari aktor-aktor non Negara dalam sistem internasional yang memiliki pengaruh sehingga dapat memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Aktor non negara ini dapat berupa I-NGO (International-Non Government Organization) maupun MNC (Multi National Cooperation). Sumber eksternal juga berupa permasalahan yang terjadi di dunia internasional atau tindakan dari aktor-aktor internasional yang memengaruhi kebijakan Amerika Serikat.

Societal Sources

Societal Sources diartikan sebagai dua variabel yaitu opini public dan politik dalam negeri yang dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan itu sendiri, hal ini menjadi penting karena politik luar negeri merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu Negara.

Governmental Sources

Governmental Sources diartikan sebagai sumber-sumber dari pemerintahan merupakan aspek-aspek dari struktur pemerintah yang membatasi atau menambah pengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Seperti contoh CIA dan Departemen Luar Negeri yang memiliki informasi penting terkait proses pengambilan kebijakan luar negeri.

Role Sources

Di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri terdapat peran-peran penting, karena pembuat keputusan dipengaruhi oleh tingkah laku sosial dan norma-norma yang berlaku dalam peran yang dipegang oleh seseorang. Posisi pembuat keputusan dapat memberikan pengaruh terhadap masukan bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat

Individual Sources

Karakteristik seorang pembuat kebijakan dapat menentukan arah dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hal ini dikarenakan di dalam proses pembuatan kebijakan sifat dari presiden dapat memengaruhi keputusan-keputusan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.

Maka dari beberapa faktor dan penjabaran panjang di atas yang menjadi fokus peneliti di sub judul pada bab ini adalah pengaruh politik domestik yakni kelompok kepentingan atau *Interest Influencers* di Amerika Serikat yang posisinya sangat kuat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama dalam politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah atau secara spesifik ke Negara Israel-Palestina. Lalu seperti apa seluk-seluk beluk kelompok kepentingan di Amerika Serikat yang pro-Israel?.

Peneliti menggunakan kata Lobi Yahudi atau Lobi Israel di Amerika Serikat sebagai individu atau kelompok sebagai “Pro-Israel”. Alasannya karena aktivitas lobi ini bukan sebuah gerakan tunggal, bersatu, dengan seorang pemimpin terpusat, dan individu-individu serta kelompok-kelompok yang membentuk koalisi lebar ini kadang-kadang tidak sependapat dalam isu-isu kebijakan-kebijakan tertentu. Begitu pula aktivitas lobi ini bukan sejenis *cabal* atau konspirasi. Karena sebaliknya, individu-individu dan organisasi-organisasi yang membentuk lobi ini juga beroperasi secara terbuka dan dengan cara sama seperti kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Menggunakan terma “Pro-Israel” karena sejauh ini juga banyak individu dan sebagian kelompok dalam koalisi longgar ini tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan lobi formal (upaya-upaya langsung untuk membujuk para pejabat terpilih). Sebaliknya, berbagai bagian dalam lobi itu bekerja memengaruhi kebijakan Amerika Serikat melalui bermacam-macam cara, sebagian besar sama dengan kerja kelompok-kelompok kepentingan lain. Dan yang paling pas menyebut mereka dengan sebutan “Komunitas Pro-Israel” atau bahkan “gerakan membantu Israel”.

Pada studi kebijakan luar negeri, kelompok lobi ini dikenal dengan istilah *Power of Informal Structure* (Loveell, 1970: 256). Biasanya kelompok ini muncul pada negara yang menganut sistem terbuka seperti negara Barat. Kekuatan struktur informal ditandai pula dengan kemunculan

perkembangan media massa yang sangat baik. Terdapat dua teori lobi yang dikenal dengan istilah pluralis dan elitis. Pluralis adalah sebuah konsep ketika kelompok lobi menjalankan peran penting lebih daripada perumus kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Sedangkan elitis adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok lobi tidak lain adalah sebuah kepanjangan tangan dari pemerintah dan segala aktivitas lobi mereka dikendalikan secara penuh oleh perumus kebijakan. Dan aktivitas lobi didasarkan oleh kebutuhan mereka untuk mencapai kepentingan kelompok melalui kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah. Dan kelompok kepentingan akan melobi pemerintah baik secara sembunyi maupun terbuka terhadap publik (Iqbal , 2017, p. 148).

Hebatnya, komunitas lobi Pro-Israel ini untuk mencapai kepentingannya mereka akan melobi pemerintah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka terhadap publik. Bahkan komunitas Pro-Israel ini tidak segan-segan menggunakan metode lobi seperti penyipuan, pemerasan, pemaksaan, penguasaan diskursus publik ataupun pencemaran nama baik. Intinya menggunakan metode lobi secara diam-diam digunakan bila lobi ditujukan secara personal, sementara aktivitas lobi secara terang-terangan ditujukan untuk meraih dukungan massa dan opini publik. Situasi semacam ini kemudian menunjukkan bahwa lobi ini mempunyai sebuah inti yang terdiri atas organisasi-organisasi dengan tujuan jelas mendorong pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat Amerika menyediakan bantuan material untuk Israel dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahnya, begitu pula tokoh-tokoh berpengaruh yang menjadikan tujuan-tujuan tadi prioritas utama. Sudah barang tentu, lobi itu juga menghimpun dukungan dari kelompok-kelompok dan individu di daerah abu-abu yang mempunyai komitmen terhadap Israel dan ingin agar Amerika Serikat terus mendukungnya, tetapi mereka tidak seaktif dan sekonsisten kelompok-kelompok dan

individu-individu yang membentuk bagian inti (Mearsheimer & Walt, 2010).

Dan perlu dijabarkan juga bahwa individu dan kelompok lobi Pro-Israel ini tidak datang dari salah satu ideologi, partai, keyakinan religius dan faktor biologis semata, mereka datang dari berbagai lapisan dan etnik-etnik tertentu. Misalkan ada orang-orang yang selalu mendukung kepentingan Israel datang dari warga Amerika keturunan Yahudi yang kecil hingga besar di Amerika Serikat. Mereka memiliki komitmen mendalam untuk memastikan agar kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu mengutamakan dan mendahulukan kepentingan-kepentingan Israel.

Warga Amerika keturunan Yahudi ini telah membentuk organisasi-organisasi massa dengan jumlah yang mengesankan, dengan agenda-agenda meliputi upaya-upaya demi Israel, dalam banyak kasus dengan cara memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Organisasi-oragnisasi utama mereka meliputi AIPAC, American Jewish Congress, ZOZ, Israel Policy Forum (IPF), American Jewish Committee, ADL, Religious Action Center of Reform Judaism, Americans for a Safe Israel, American Friends of Likud, Mercaz USA, Hadassah, dan banyak yang lain lagi. Bahkan seperti laporan Sosiolog Chaim I. Waxman pada tahun 1992, ada 80 lebih organisasi Yahudi nasional, terutama yang membela Zionis dan menjalankan kegiatan-kegiatan seperti mempromosikan pemahaman terhadap Israel, mendukung Negara Israel, mempromosikan pemahaman terhadap Israel yang kesemuanya muncul dalam frekuensi yang sangat mengesankan. Dan 51 organisasi yang paling besar dan paling penting terhimpun dalam Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, dengan misi yang jelas dengan sendirinya, termasuk “menyentukan kelompok-kelompok yang beragama menjadi sebuah kekuatan yang bersatu demi kesejahteraan Israel” dan “berusaha untuk memperkuat dan

mempererat hubungan khusus Amerika-Israel” (Mearsheimer & Walt, 2010, p. 182).

Aktivitas lobi ini juga meliputi wadah-wadah pertukaran pikiran seperti Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA), Middle East Forum (MEF), dan WINEP, selain individu-individu yang bekerja di universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitian lain. Ada pula puluhan komite aksi politik (*Political Action Committee/PAC*) pro-Israel yang siap menyalurkan danan ke calon-calon pemangku jabatan politik yang pro-Israel atau calon-calon dengan lawan yang dianggap entah tidak cukup mendukung atau bahkan memusuhi Israel. Center for Responsive Politics, sebuah kelompok riset yang tidak berpihak yang melacak sumbangan dana kampanye, telah mengidentifikasi kurang lebih tiga puluh PAC Pro-Israel semacam itu (banyak di antara mereka berada di belakang layar, dengan nama-nama yang tidak mengungkapkan orientasi Pro-Israel) dan melaporkan bahwa organisasi-organisasi ini ini menyumbangkan sekitar 3 juta dolar kepada calon-calon anggota kongres dalam pemilihan-pemilihan tengah semester tahun 2016 (Mearsheimer & Walt, 2010, p. 183).

Perlu dicermati, pengaruh yang sekarang bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok seperti AIPAC tidak muncul dalam semalam. Selama tahun-tahun sejak awal Zionisme, bahkan setelah pendirian negara Israel, melobi kepentingan Israel cenderung dilakukan secara diam-diam di belakang layar dan biasanya bergantung pada kontak-kontak pribadi antara pejabat-pejabat pemerintah yang berpengaruh, terutama presiden, dan kelompok kecil tokoh Yahudi, penasehat Pro-Zionis, atau sahabat-sahabat Yahudi. Sebagai contoh, dukungan Woodrow Wilson terhadap Deklarasi Balfour pada tahun 1917 antara lain terjadi berkat pengaruh sahabat-sahabat Yahudi-nya di Mahkamah Agung Louis D. Brandeis dan Rabbi Stephen Wise. Begitu pula, keputusan Haary S. Truman untuk mendukung pendirian Negara Israel

dan mengakui Negara baru itu dipengaruhi (walaupun tidak ditentukan) oleh pertemuan-pertemuan dengan sahabat-sahabat dan penasihat-penasihat Yahudi (Sharp, 2006, pp. 5-6).

Sementara yang patut diperhatikan adalah, komunitas Pro-Israel ini mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara Partai Demokrat dan Republik. Walaupun secara mayoritas elite neokonservatif yang berada di Partai Republik berkuasa saat itu, hal ini tidak memengaruhi koalisi politik dengan Partai Demokrat di parlemen. Bila ditelaah secara teori pluralis, koalisi politik tersebut dilandasi oleh eksistensi lobi Israel itu sendiri yang mempunyai pengaruh kuat di pemerintahan. Elite politik yang berada di Partai Demokrat memiliki kepentingan politik yang sama dengan Partai Republik kepada kelompok lobi Israel. Selain itu, Partai Demokrat pun tidak bisa terlepas dari tuduhan anti-semit yang berpengaruh pada karir politik mereka. Hal ini pernah menimpa Ketua Partai Demokrat Howard Dean yang pernah dituduh anti-Semit oleh kelompok lobi Yahudi. Elite politik di Senat baik dari Partai Demokrat atau Republik berkoalisi pula mendukung kebijakan AS terhadap Israel. Salah satunya ada Senator Hillary Clinton, Joe Biden dan John McCain yang berpotensi menjadi presiden pada pemilu selanjutnya (Mearsheimer & Walt, 2010, pp. 311-312).

Selain kelompok lobi Yahudi, ternyata ada kelompok Zionis Kristen yang juga mendukung kepentingan-kepentingan Israel di Amerika Serikat. Kelompok ini adalah sebuah kelompok kepentingan dengan anggota non Yahudi, yakni sub-himpunan kelompok lebih besar yang berorientasi politik lebih luas, Kristen Kanan. Anggota-anggota kelompok ini antara lain adalah tokoh-tokoh religius seperti mendiang Jerry Falwell, Gary Bauer, Pat Robertson, dan Jhon Hagee, selain politikus-politikus seperti mantan House Majority Leaders Tom DeLay (Partai Republik-Texas) dan Richard Armey (Partai Republik-Texas), dan Senator James Inhofe (Partai Republik-Oklahoma). Walaupun dukungan kepada Israel

bukan tujuan utama mereka, sejumlah penginjil Kristen telah makin terang-terangan dan makin vokal dalam mengungkapkan dukungan mereka kepada Negara Yahudi ini, dan mereka belum lama ini telah membentuk serangkaian organisasi untuk mengedepankan komitmen tersebut dalam sistem politik. Mereka adalah “Mitra Junior” penting dalam berbagai kelompok Pro-Israel di Komunitas Yahudi Amerika.

Kaum Zionis Kristen telah membentuk sejumlah organisasi-organisasi yang khusus bertujuan meningkatkan dukungan kepada Israel. Kelompok-kelompok ini meliputi Christians United for Israel (CUFI, yang oleh pendirinya, Jhon Hagee, disebut sebagai “versi Kristen untuk American Israel Public Affairs Committee”), National Christian Leadership Conference for Israel, Unity Coalition for Israel, Christian Friends of Israeli Communitis (CFIC), Christians Israel Public Action Committee, International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ), dan sejumlah kelompok lebih kecil. Hebatnya, dalam zaman aktivitis modern ini, kepercayaan kaum Zionis Kristen secara alami selaras dengan kelompok-kelompok dalam komunitas Yahudi Amerika dan di Israel yang mendukung gerakan pemukiman dan menentang solusi dua Negara. Menurut pendiri CUFI Hagee, “Kami mendukung Israel karena semua Negara lain didirikan oleh upaya manusia, sedangkan Israel diciptakan oleh upaya Tuhan!”, Hagee juga memberitahu para pendukungnya bahwa “Tuhan menentang penyerahan tanah itu” dan mengaku gerakannya telah menghimpun lebih dari 12 juta dolar untuk membantu memukimkan imigran-imigran baru di Israel, termasuk di permukiman-permukiman di Wilayah Pendudukan (Mearsheimer & Walt, 2010, p. 210).

Dari pemaparan di atas kemudian, mengapa lobi pro-Israel begitu kuat dan efektif?. Jawabannya salah satunya dikarenakan Amerika Serikat memiliki sistem politik yang sangat terbuka selebar-lebarnya. AS memiliki bentuk pemerintahan dengan kekuasaan yang terbagi-bagi, sebuah

tradisi kebebasan berbicara yang sudah mapan, an sebuah sistem dengan pemilihan yang sangat mahal penyelenggaraannya dan dengan regulasi untuk sumbangan dana kampanye yang lemah. Maka lingkungan seperti itulah yang membuat tiap kelompok mempunyai cara masing-masing untuk memperoleh akses atau untuk memengaruhi kebijakan. Sehingga efektivitas lobi Pro-Israel sangat cocok tumbuh berkembang dalam tatanan masyarakat yang pluralistik.

Yang tak kalah pentingnya, mereka memiliki sumber daya dan keahlian dengan tingkat yang sangat mengesankan dalam organisasi-organisasi Yahudi utamanya dalam lobi. Menurut ahli ilmu politik Robert Trice, “Sebagian besar kelompok Yahudi yang kuat dapat dicirikan dari anggota yang banyak, staf profesional yang sangat terlatih, program-program sosial, kesejahteraan, dan politik yang memiliki keuangan memadai, serta kelompok-kelompok kerja khusus untuk masalah tertentu dan jaringan komunikasi yang canggih di antara mereka.” Selain itu, keberadaan organisasi-organisasi serupa di tingkat local dan nasional menerangkan “kemampuan gerakan Pro-Israel dalam memobilisasi dengan cepat dan sangat terkoordinasi dalam skala nasional ketika isu-isu kebijakan luar negeri yang penting muncul” (Guttman, 2006).

Terakhir, ada satu hal yang tidak dilepaskan dari pentingnya Israel sebagai mitra strategis AS. Menurut informan dari ISMES, ada sebuah doktrin yang disebut dengan *Israeli First*, setiap kebijakan luar negeri AS yang bersentuhan langsung dengan Negara Israel, para pembuat kebijakan selalu mengedepankan doktrin ini. doktrin ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS ke Timur Tengah yang dihasilkan pasti akan berpihak pada Israel. Kebijakan ini pun mengaburkan fakta-fakta yang ada tentang Israel sebenarnya. Sehingga apapun tindakan yang dilakukan Israel, AS tetap akan memprioritaskan Israel. Adapun lawan dari *Israeli First* ini adalah doktrin *Evenhanded*. Sebuah doktrin yang lebih

netral dan mengedapankan data-data factual. Sayangnya, hanya sedikit pembuat kebijakan luar negeri AS yang berpegang pada doktrin ini.

Dalam artikel yang ditulis Jonathan Cook di Middle East Eye pada 30 Juni 2018, mengatakan bahwa sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS ternyata ada empat kelompok lobi kuat di AS, yakni Kristen Evangelis, Sayap Kanan Alternatif (The Atl-Right), Kompleks Industri Kongres (Military Industrial Complex, MIC), dan Arab Saudi. Dari beberapa kelompok kepentingan di Amerika Serikat tersebut, mereka telah menunjukkan pengaruhnya yang sebelumnya tidak terlalu intens dan kurang terlihat pengaruhnya sebelum AS dipimpin Donald Trump. Bahkan dengan standart lobi yang besar, mereka bisa memengaruhi tataran eksekutif sekalipun. Salah satu keberhasilan mereka adalah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat tentang pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakuinya sebagai Ibu Kota Israel.

Sebelum lebih jauh membicarakan lobi-lobi yang dilakukan kelompok kepentingan pro-Israel, patut dijelaskan bahwa di dalam tubuh kelompok-kelompok lobi tersebut ada sebuah penjelasan bahwa mereka terdiri dari dua kubu yang bisa dilihat dari sifatnya, yakni lobi dengan sifat formal dan kelompok lobi yang sifatnya informal. Dalam penjelasannya, kelompok lobi formal ini dicirikan bahwa kelompok lobi pro-Israel sebagai jaringan-jaringan yang telah terorganisasi baik dan tidak sembunyi-sembunyi. Seperti kelompok Komite Aksi Politik (PAC), AIPAC, Christians United for Israel, Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations dan lain lain. Tujuan mereka jelas demi kepentingan Israel, sehingga tujuan para donor-donor dari kelompok lobi formal ini untuk membina hubungan keharmonisan antara Amerika Serikat dengan Israel serta mendukung Israel dan konflik bersenjata dengan negara-negara tetangganya. Dan kelompok lobi formal ini bisa

dicirikan sebagai komunitas-komunitas keturunan Yahudi (Israel) yang ada di Amerika Serikat.

Sementara itu, kelompok lobi informal adalah dukungan-dukungan lobi yang datang individu-individu dan penganut Kristen Avengelis atau bahkan satu sumber menyebut hampir semua orang Kristen dari berbagai denominasi atau sekte. Uniknya mereka tidak terikat secara hubungan biologis atau darah dengan bangsa Israel atau paham Yahudi, tetapi ketika berbicara Negara Israel mereka berada di garda terdepan. Dukungan mereka biasanya datang dalam wujud pemrograman dan berita di Christian Broadcasting Network dan Christian Television Network sampai bantuan tidak resmi untuk perayaan *Day of Prayer for the Peace of Jerusalem* setiap tahunnya (Gerhard, 2006, p. 50).

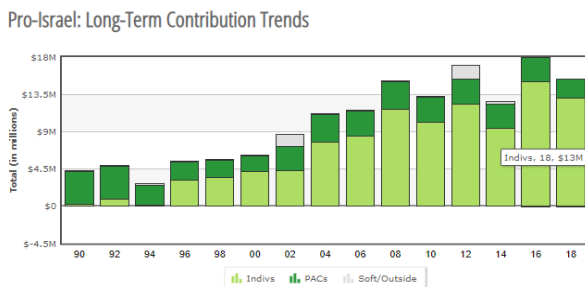
Dari ciri kelompok lobi informal tersebut hebatnya, meskipun bukan dari latar belakang Yahudi Israel, dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan negara Israel mereka ternyata mereka pendukung setia kepentingan-kepentingan Israel. Dan sebenarnya ada pergeseran cerita bahwa sebelumnya ketika membicarakan kelompok pro-Israel atau bahkan Jewish Lobby (Lobi Yahudi) sangat riskan dan keberadaan mereka seolah-olah haram untuk diberitakan. Ketika ada yang mengungkit-ngungkit keberadaan mereka, maka akan dituduh anti-Semit. Namun untuk konteks saat ini, tembok tebal dan keekklusifan itu kemudian dihancurkan oleh dua akademisi terkemuka AS, Jhon Mearsheimer dan Stephen Walt. Pada tahun 2006, mereka dengan berani menulis seluk-beluk keberadaan aktivitas lobi dan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat, yang awalnya hanya berbentuk artikel atau esai hingga kemudian menjadi sebuah buku. Maka sejak saat itu, keterbukaan berbicara aktivitas lobi pro-Israel semakin diapresiasi karena pengaruhnya sangat besar terutama bagi Israel dan AS sendiri yang seolah-olah dipertainkan. Tentang keterbukaan ini kemudian, seorang kolumnis New York Times Thomas Friedman—yang memang sangat setia

terhadap Israel—mengetahui bahwa kelompok dan aktivitas lobi tersebut memang ada. Namun kalau ditarik pada pertanyaan lebih jauh, bukan tentang apakah lobi ada, tetapi mengapa sistem Politik AS sepertinya tidak bisa melakukan apa pun untuk melindungi diri dari gangguan lobi tersebut. Jika tangan-tangan tersembunyi Rusia Vladimir Putin yang disembunyikan AS adalah ancaman hebat, mengapa lobi Pro-Israel tidak?.

Di balik keputusan Donald Trump dan Amerika Serikat memindahkan Kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ada kelompok-kelompok kepentingan dan individu-individu Pro-Israel yang memainkan pengaruhnya dalam menekan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari berbagai literatur yang didapat peneliti, kebanyakan yang memainkan peran dalam melobi eksekutif Amerika Serikat datang dari kelompok lobi informal dan juga individu-individu. Dari kelompok formal buka tidak ada tetapi, kelompok lobi formal sebenarnya lebih condong kepada kandidat atau kepada orang-orang Demokrat.

Pertama, dalam membahas keputusan Donald Trump terkait Pemindahan Kedubes AS dari Tel-Aviv ke Yerusalem dan Mengakuinya sebagai Ibu Kota Israel memang tidak luput dari pengaruh kelompok lobi formal yang sejak puluhan tahun lalu memainkan tangan-tanganya di Amerika Serikat. Seperti artikel yang ditulis Heather Timmons 2017 menjabarkan bahwa, pelobi pro-Israel yang berkuasa telah menghabiskan puluhan juta dolar di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, dengan harapan dapat memengaruhi Kongres dan cabang-cabang eksekutifnya. Karena dihantui kekhawatiran bahwa presiden Barack Obama (saat Obama berkuasa) akan kurang mendukung Israel, sumbangan oleh individu dan komite aksi politik melonjak di tahun 2008, tahun pertamanya Obama menjabat. Sumbangan mereka mencapai rekor hampir \$20 miliar pada tahun 2016, dan pada tahun 2017-2018 jumlah bantuan semakin naik pesat.

Tabel 4.1 Bantuan Finansial Kelompok Pro Israel Terhadap Elit Pemerintahan AS dari Tahun 1990-2018



Sumber : www.opensecrets.org

Grafik dan angka-angka pada halaman di atas didasarkan pada kontribusi dari donor (individu maupun perusahaan dan serikat pekerja yang memberikan langsung dari kas mereka) kepada kelompok luar dan dari PAC (termasuk PAC super) dan individu yang memberikan lebih \$ 200 kepada kandidat dan komite partai (www.opensecrets.org, 2018).

Tabel 4.2 Bantuan Finansial Kelompok Lobi Yahudi Terhadap Elit Pemerintahan AS di Tahun 2018

Top Lobbying Clients, 2018

Client/Parent	Total
American Israel Public Affairs Cmte	\$2,634,865
Israeli-American Coalition for Action	\$510,000
J Street	\$300,000
Zionist Organization of America	\$150,000
Christians United for Israel Action Fund	\$90,000

Sumber : www.opensecrets.org

Grafik dan angka-angka di atas menunjukkan sumbangan besar finansial kelompok Lobi Yahudi kepada pemerintah, termasuk kepada eksekutif Amerika Serikat yang jumlahnya sangat signifikan pada tahun 2017-2018. Kegiatan lobi yang telah bertahun-tahun dilakukan kelompok lobi Yahudi tersebut menjadi peluang emas untuk kandidat-kandidat presiden Amerika Serikat yang ingin maju di Pilpres. Dalam beberapa tahun terakhir, memang kandidat politik AS telah mencoba untuk mengalahkan pesaing mereka dengan melihat siapa yang lebih pro-Israel dalam kelompok lobi ini, dengan harapan akan memberi mereka lebih banyak dukungan secara finansial dan sebaliknya. Dan salah satu kelompok Lobi yang jor-joran menggelontorkan dana adalah AIPAC yang sampai menghabiskan jutaan setiap tahunnya untuk melobi pengambil kebijakan (*Policy Influencer*) Amerika Serikat. Tekanan kelompok lobi pro-Israel di Amerika Serikat memang sangat luar biasa. Perlu dijabarkan bahwa kelompok lobi ini adalah terdiri dari warga Amerika Serikat baik keturunan Yahudi atau dari non Yahudi, mereka juga dating dari individu-individu lainnya yang memang memiliki komitmen mendalam untuk memastikan agar kebijakan luar negeri AS selalu mengutamakan/mendahulukan kepentingan-kepentingan Negara Israel.

Kedua, datang dari kelompok informal atau individu. Ada satu tokoh yang banyak sumber literatur katakan memengaruhi Donald Trump. Dilaporkan sepuluh hari sebelum pelantikan presiden Trump pada Bula Januari 2017, Miliarder Kasino dan donor tetap dan terbesar di Republik (2016) Sheldon Adelson menemui Donald Trump di New York. Dia menyampaikan dukungan yang sangat besar terhadap usaha pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem, karena baginya adalah prioritas yang telah lama bersemayam dalam hatinya (Cherkaoui, 2017). Mark Landler dalam artikelnya juga menjelaskan kalau Komite Aksi Politik (PAC) yang pro-Trump mendapat manfaat dari sumbangan \$20 juta oleh Adelson yang dan ia juga memberikan \$ 1,5 juta lagi

kepada PAC yang mengorganisasi Partai Republik pada musim panas 2016, dan sumber lain mengatakan kalau sumbangan Adelson hingga mencapai \$83 juta.

Berapapun jumlah yang digelontorkan Adelson, yang terpenting AS secepatnya memindahkan Kedubesnya. Ada sebuah teori mengatakan bahwa Adelson dan istrinya Mirriam Ochsorn adalah pendorong utama dalam topik yang peneliti ini teliti. Bahkan seorang professor sejarah di Universitas Nevada, Michael Green mengatakan kalau “pasangan suami istri Adelson dan Mirriam adalah dua orang yang benar-benar memiliki komitmen ideologis yang lebih besar dari segelintir orang”, bahkan diketahui kalau pasangan suami istri ini bisa mengangkat telpon dan menghubungi Gedung Putih dengan sangat gampang. Pada akhirnya koneksivitas pribadi dan politik Adelson-Trump telah melampaui mekanisme murni dalam politik Amerika Serikat sendiri. Mearsheimer dan Walt telah memperingatkan terhadap efek negatif dari lobi Israel ini. Mereka menunjukkan bagaimana lobi pro-Israel memiliki efek negatif tidak hanya pada kepentingan Amerika, tetapi dampaknya juga telah dirasakan secara tidak sengaja juga membahayakan Israel.

Faktor ketiga juga dari lobi informal yakni pengaruh kelompok Kristen Evangelis. Mereka adalah pelobi pro-Israel yang juga memberikan insentif finansial besar, mendukung Donald Trump sebesar-besarnya dalam pemilihan presiden, dan ketika tampuk kekuasaan telah dipegang Trump mereka tentu memberikan tekanan-tekanan tambahan. Ketika Donald bertemu dengan perwakilan kelompok Kristen Evangelis, mereka mendesak Trump untuk mengambil tindakan tentang status Kedutaan AS di Israel. Misalnya, Presiden Dewan Penelitian Keluarga, Tony Perkins pernah mengenang bahwa selama pertemuan-pertemuan yang dihadapinya “disampaikan bahwa orang-orang Injili dan orang Kristen percaya bahwa Alkitab melihat ada hubungan khusus dengan Israel”. (Cherkaoui, 2017).

Beberapa Kristen Evangelis menafsirkan deskripsi Perjanjian Lama tentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel 1.000 tahun sebelum Kristus sebagai tanda dari kejadian yang akan datang, seperti yang dijelaskan oleh Gary M. Burge di Atlantik. Mereka “percaya bahwa mempromosikan pentingnya Yerusalem adalah satu langkah penting dalam pemenuhan nubuat yang akan mempersiapkan Kedatangan Kedua Kristus,” tulisnya. Kristen Evangelis memberi tekanan pada Trump untuk membuat keputusan tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, dan beberapa bersukacita setelah keputusan tersebut. “Dalam Perang Enam Hari akhirnya orang-orang Yahudi mengambil kedaulatan atas Yerusalem, dan ini sangat penting dalam hal nubuat Alkitab bahwa mereka mempertahankan kendali atas hal itu,” kata juru bicara televangelis Pat Robertson pada 5 Desember, merayakan keputusan Trump. Bahkan Rene Omokri, pendiri “Pusat Kristen Mind of Christ” California, mengatakan bahwa dia sekarang bersedia mati untuk Trump (Timmons, 2017).

2. Jerusalem Embassy Act 1995

Selain karena kuatnya pengaruh kelompok kepentingan atau kelompok dan individu pro-Israel, dalam politik dalam negeri Amerika Serikat ada satu RUU yang mewajibkan kepala negaranya untuk memindahkan Kedubes Amerika Serikat di Israel pada tahun 1995, RUU tersebut adalah *Jerusalem Embassy Act of 1995*. *Jerusalem Embassy Act of 1995* adalah undang-undang yang pernah disahkan Kongres tanggal 23 Oktober tahun 1995. Undang-undang tersebut sebagai badan hukum atas proses awal pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel, dan pewujudannya paling lambat tanggal 31 Mei 1999 (Breger, 1995).

Undang-undang yang disahkan Kongres tersebut akhirnya dapat direalisasikan oleh Donald Trump. Ia secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai

persiapan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, bahkan sekarang telah dilakukan pembangunan gedung Kedubes baru di Yerusalem. Dan setelah pengumuman kebijakan baru itu, Donald Trump telah menandatangani MOU presiden diperuntukkan Menteri Luar Negeri AS yakni ketetapan Presiden No. 2018-02 isinya adalah pemotongan 50% *budget* yang biasanya direalisasikan jikalau membuka kedutaan besar baru. Maka dengan Kongres bisa meloloskan Undang-undang yang mengharuskan AS segera memindahkan Kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi salah satu alasan keputusan Donald Trump. Trump tidak ujuk-ujuk merealisasikan RUU tersebut, ia juga pernah sekali menandatangani surat penangguhan realisasi RUU tersebut pada 01 Juni 2017 karena di bulan itu sudah jatuh tempo. Akan tetapi Donald Trump tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda RUU untuk direalisasikan di enam bulan berikutnya. Karena pada enam bulan berikutnya reputasi Donald Trump dipertaruhkan di hadapan donor-donornya, apalagi tekanan-tekanan kuat dari kelompok lobi pro-Israel yang selalu menghantui Donald Trump.

3. Janji Kampanye Donald Trump

Selain kedua faktor tersebut di atas, kebijakan Donald Trump tersebut juga cenderung berusaha menyenangkan basis massa pendukungnya dan memenuhi janji kampanyenya. Membaca Trump sewaktu kampanye sebelum menjadi presiden dan atas kebijakan-kebijakan yang dibuatnya terutama tentang Yerusalem dapat dikaitkan dengan dua penyebab utama, *Pertama*, Donald Trump menggunakan gaya Populisme Politik di dalam kampanye-kampanyenya. Yang *Kedua*, yakni pernyataan yang dibuat oleh tim kemenangan Trump dan oleh Politisi Israel sendiri.

Sejak awal kampanye, Donald Trump memang mengungkapkan untuk merelokasi kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bahkan saat bertemu dengan Perdana Menteri

Benjamin Netanyahu pada September 2016, Trump mengakui bahwa Yerusalem telah menjadi modal abadi orang-orang Yahudi selama dari 3.000 tahu, dan Amerika Serikat-Israel adalah sahabat abadi. Trump mengatakan akan merelokasi kedutaan “cukup cepat” setelah menjabat. Bahkan seorang penasehat Real Estate yang pernah bekerja sebelumnya dengan Trump mengatakan “akan segera merelokasi pemindahan kedutaan AS di Israel”. Dan beberapa waktu kemudian, setelah Trump menjadi presiden Penaseha Trump Kellyanne Conway mengatakan bahwa pemindahan kedutaan adalah “Prioritas” di kepemimpinan Donald Trump, dan itu sangat besar (Studies, 2017).

Donald Trump berjanji memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem di hadapan orang-orang Kristen Evangelis, di mana mereka adalah salah satu kelompok pro-Trump yang paling setia dari pemilih Amerika, sekitar 53 persen mendukung perpindahan kedutaan ke Yerusalem, sementara 40 persen menentang relokasi tersebut, (Telhami , 2017). Dan motivasi utama Trump membuat pernyataan tersebut termasuk usaha memenuhi janji kampanyenya untuk membuat kebijakan yang mengedepankan kepentingan warga AS di atas segalanya yang dikenal dengan kebijakan “*America First*”. Donald Trump juga berjanji di hadapan massa kelompok lobi AIPAC yang mengatakan, “Setelah lebih dari dua dekade keringanan, kita tidak mendekati kesepakatan damai antara Israel dan Palestina,” kata Trump, kemudian mencantumkan alasan mengapa Yerusalem adalah ibu kota Israel yang sah, termasuk fakta bahwa itu adalah tempat parlemen Israel. “Akan menjadi kebodohan jika mengasumsikan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik”.

B. Ekonomi dan Militer

Situasi Ekonomi dan Militer negara merupakan faktor penting bagi pertumbuhan/kemajuan suatu negara, dan setiap negara tentu memiliki tujuan nasional di bidang

ekonomi maupun militer. Maksudnya adalah bahwa negara tersebut harus mampu atau memiliki kesediaan untuk menciptakan kondisi yang diperlukan atau kondusifitas sebagai penopang politik luar negerinya baik dari persepektif ekonomi maupun keamanan atau militernya (Coplin & Marbun, 2003). Secara realistis-historis, Ekonomi dan Militer Amerika Serikat memang paling mapan dan paling kuat di dunia hingga saat ini. Sebagai penyandang predikat negara *Super Power* atau negara adidaya, Amerika Serikat lebih unggul daripada negara-negara lain apalagi negara terbelakang. Dalam kemampuan ekonomi dan dalam hal senjata nuklir dengan sistem peluncurannya yang maju, membuat negara-negara berkembang bahkan maju sekalipun mendekati Amerika Serikat untuk melakukan kerjasama bilateral. Sedangkan untuk pihak Amerika Serikat sendiri ketika ada satu-dua negara melakukan kerjasama menganggapnya sebagai sekutu yang potensial dan proporsional.

Kalau melihat kerjasama ekonomi dan militer antara Amerika Serikat dengan Israel adalah satu hubungan bilateral antara negara adidaya dengan negara maju. Menurut Coplin, hubungan antara dua negara dalam sektor Ekonomi dan Militer terjadi karena faktor simbiosis-mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Kalau dikontekskan dengan teori Coplin, hubungan Amerika Serikat dengan Israel adalah representasi dari negara adidaya dengan negara maju. Namun yang harus diperhatikan menurut Coplin ternyata ada fenomena lagi yang kadang luput dari pantauan kita. Meski negara adidaya cukup gampang untuk menyetir dan menekan negara-negara maju, namun mereka telah mendekati negara adidaya dengan cara defensif dan represif, baik dengan mengklaim netralitas ataupun dengan memaksakan suatu aliansi dengan salah satu pihak negara adidaya (Coplin & Marbun, 2003). Hal ini yang terjadi dalam hubungan Ekonomi dan Militer Amerika Serikat dengan Israel. Pendekatan defensif dan represif Israel dari puluhan tahun lalu hingga saat

ini membuat Amerika Serikat tanpa pamrih memberikan bonus-bonus bantuan yang luar biasa besarnya terhadap Israel.

Dalam konteks militer, Amerika Serikat memberi bantuan militer terbesar terhadap Israel yang disahkan pada Rabu (14/09/2016). Waktu itu Amerika Serikat dan Israel menandatangani nota kesepahaman paket bantuan militer terbesar dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Paket bantuan tersebut senilai 38 miliar dolar AS atau sekitar Rp 500 triliun untuk jangka waktu 10 tahun. Dari paket bantuan itu, Israel akan menerima 3,8 dollar AS (50,029 triliun) setiap tahun. Dan paket bantuan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan yang diterima Israel selama ini sejak tercapainya kesepakatan damai Israel-Mesir di Camp David tahun 1979, yakni sekitar 3,1 miliar dollar AS pertahun (Rahman, 2016).

Menurut data *Congressional Research Service*, jumlah bantuan Amerika Serikat sejak 1949 hingga 2017 telah mencapai sekitar 127,5 miliar dollar AS. Jumlah tersebut mencakup bantuan berbagai bidang, di antaranya bantuan ekonomi senilai 30,8 miliar dolar AS dan 79,8 dolar AS untuk bantuan militer (www.kumparan.com, 2017). Berbagai kerjasama ekonomi-militer telah lahir dari hubungan bilateral Amerika Serikat dan Israel diantaranya adalah *United State Israel Enhance Security Cooperation Act of 2012*, *United State-Israel Missile Defense Cooperation Act of 2013*, *United State-Israel Energy Cooperation Act*, *United States Israel Strategic Partnership Act of 2013*, *Iron Dome Support Act*, *Memorandum of Understanding* (Priyatna, 2014).

Israel tidak bisa dimungkiri merupakan prioritas utama penerima bantuan luar negeri Amerika Serikat, dan pembeli utama sistem persenjataan Amerika Serikat, kedekatan hubungan kedua negara sudah dibangun sejak Israel didirikan pada Mei 1948. Bahkan ada anekdot: *senjata terancanglah yang dibuat AS hari ini, keesokan hari sudah ada*

di Israel. Paket bantuan militer jumlah besar yang diberikan Amerika Serikat untuk Israel tujuannya untuk menjamin keamanan Israel di tengah ancaman negara-negara tetangganya (negara-negara Arab, terutama Iran) yang tengah bergejolak dengan perang.

Secara kasat mata kebijakan luar Amerika Serikat atas pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem dan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel berdampak buruk dan Amerika Serikat seolah-olah tidak mendapatkan insentif apa-apa. Akan tetapi dibalik itu semua juga berdampak baik berkat kemitraan dengan Israel sebagai kaki tangannya di Timur Tengah, terutama pengaruh dalam ekspansi ekonomi terhadap negara-negara Arab mengingat sudah terkikisnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan minyak tersebut. Dan kepentingan utama Amerika Serikat atas kedetakatannya dengan Israel bukan karena simpati kepada orang-orang Yahudi sebagai korban Perang Dunia II atau alasan dangkal lainnya, melainkan karena alasan praktis untuk mengamankan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur-Tengah yang sebelum era kepemimpinan Trump kurang diperhitungkan lagi.

Dalam konteks ekonomi, kebijakan Amerika Serikat memindahkan Kedubes dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel adalah bagian dari paket kebijakan-kebijakan untuk merebut pengaruh dan dominasi ekonomi kembali di Timur Tengah. Karena selain Rusia yang sangat berambisi memainkan tangan-tangannya, ada Tiongkok yang juga mulai menunjukkan taringnya di kawasan tersebut. Karena pada sudut pandang lain, kebijakan Trump tersebut sebenarnya tidak lahir di siang bolong. Meski ada gelombang protes di Timur Tengah yang notabene lahir negara-negara Arab, tapi Amerika Serikat tidak takut lagi kalau sampai negara tersebut memutus atau kemudian mengembargo pasokan minyak ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Buktinya, di tahun 2018 Amerika Serikat telah berhasil menjadi negara pertama sebagai produsen minyak, dan telah menyingkirkan Rusia dan Arab Saudi yang sebelumnya duduk di rangking teratas. Amerika Serikat untuk pertama kalinya sejak tahun 1973 menjadi produsen minyak mentah terbesar di dunia. Bahkan di Bulan Juni-Agustus 2018, *output* AS mencapai 11 juta barel perhari. Dan perkiraan Administrasi Informasi Energi AS (EIA), Amerika Serikat akan tetap di depan Rusia dan Arab Saudi hingga tahun 2019 (www.wartaekonomi.co.id, 2018). Bahkan sebuah studi yang dilakukan oleh Rystad Energy 2015-2016, mengestimasi kalau cadangan minyak di Amerika Serikat lebih melimpah dari Rusia dan Arab Saudi. Menurut Laporan Rystad Energy, sudah ditemukan sumber minyak mencapai kisaran 264 miliar barel. Sementara itu cadangan minyak di Arab Saudi mencapai 212 miliar barel dan Rusia mencapai 256 miliar barel. Analisis tersebut berdasarkan pada 60.000 ladang minyak di seluruh dunia dan dilakukan selama 3 tahun oleh Rystad Energy yang berkantor di Oslo Norwegia (www.kompas.com, 2016).

Jadi Amerika Serikat telah menerapkan *Independent Oil* dimulai dari masa kepemimpinan Barack Obama di tahun 2010-an, dan di masa Donald Trump dominasi produsen minyak dunia telah berhasil diraih. Amerika Serikat sedikit demi sedikit mengurangi volume impor minyak dari Timur Tengah. Pada awal tahun 2018, impor minyak mentah bersih AS turun sebesar 1,6 juta bph menjadi 4,98 juta barel perhari, tingkat terendah sejak EIA mulai mencatat data pada 2001. Dan yang paling penting, *Independent Oil* Amerika Serikat tersebut membuat cerita baru bahwa kebijakan-kebijakan kontroversial sekalipun tidak membuat AS gentar, karena AS dibawah nakhoda Donald Trump lebih progresif dan *Outward Looking Policy*, selalu mengusahakan produksi dalam negeri agar dapat diekspor dan dapat menjadi komoditi nomor wahid di pasar internasional.

C. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya (Coplin & Marbun, 2003). Konteks internasional juga memengaruhi dan menentukan proses pengambil kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Dari ketiganya, geografi memainkan peranan yang penting walaupun tidak yang paling penting. Faktor geografi merupakan yang hal utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dan sebagainya. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antarnegara anggotanya. Dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri harus melihat faktor itu dalam membuat kebijakan. Secara geografis, Amerika Serikat merupakan negara di Amerika Utara yang membentang dari Laut Atlantik di timur hingga Laut Pasifik di barat, Amerika Serikat adalah negara paling penting di benua ini. Sesuai dengan arti “Serikat” yaitu perkumpulan atau himpunan, gabungan atau persekutuan. Akan tetapi yang musti diperhatikan, Amerika Serikat sebagai negara *Super Power* memiliki pengaruh besar di dalam kawasan, lintas kawasan bahkan di dunia internasional seutuhnya. Kebijakan pemindahan Kedubes AS dari Tel-Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tentu juga mempertimbangkan faktor internasional. Kebijakan Donald Trump ini adalah paket kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang ingin menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih tegas atas isu Israel-Palestina. Tujuan Trump adalah untuk perdamaian kedua negara di tanah gurun pasir tersebut. Karena opsi kebijakan-kebijakan sebelumnya hanya sebatas perundingan-perundingan dan *output*-nya tidak kelihatan. Maka, meski cenderung berpihak kepada Israel, Donald Trump mencoba formula baru untuk perdamaian Israel-

Palestina. “Setelah lebih dari dua dekade keringanan, kita tidak mendekati kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Akan menjadi kebodohan jika mengasumsikan bahwa mengulang formula yang sama persis sekarang akan menghasilkan hasil yang berbeda atau lebih baik. Jika Perdamain di Timur-Tengah seperti serpihan salju yang parah, maka lokasi Kedubes AS di Israel bisa mencairkannya,” kata Trump pada tahun 2016.

Dengan semboyan “*Make America Great Again*” merupakan suatu usaha sistematis di dalam negeri dan restorasi kekuatan hegemoni Amerika Serikat di level internasional. Kemudian Trump ingin memprioritaskan warga Amerika Serikat dan keamanannya terkait kebijakan luar negeri. Donald Trump dalam menghadapi persoalan politik luar negeri juga akan membangun kembali kekuatan militer dan mengembalikan kebebasan sistem finansial negara. Kebijakan Amerika Serikat atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem ternyata juga dilandasi dari sosio-politik di Timur Tengah. Timur Tengah masih menjadi tempat strategis untuk menjalankan/menyelurkan kepentingan-kepentingan domestik Amerika Serikat, termasuk dalam pemerintahan Donald Trump. Meskipun dalam kampanyenya Trump akan melakukan politik isolasionis dalam politik luar negeri, tetapi ketika menjabat jadi presiden justru Amerika Serikat lebih ofensif dalam mencengkram negara-negara sekitarnya, termasuk di Timur Tengah. Mengingat kondisi Timur Tengah dalam kondisi *Chaos* dengan segala peperangan dan pertumpahan darah, maka Amerika dengan mudah menjadi kawan ataupun lawan dengan kelompok yang berkonflik. Tujuannya apa?, yakni untuk memainkan praktik-praktik ekonomisasi dalam berbagai sektor. Di Timur Tengah, hampir seluruh negara melakukan hubungan bilateral dengan Amerika, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, apalagi Israel sendiri.

Perang di Timur Tengah masih terjadi hingga saat ini, misalkan Perang Suriah, Konflik bersenjata di Yaman, Libya yang hampir mati, Mesir yang belum menemukan arah demokrasi yang pas, referendum etnis Kurdistan, panasnya persaingan Iran dan Arab Saudi, dan kasus klasik Palestina-Israel. Kata Wartawan dan penulis Kompas, Trias Kuncayono; *“Kawasan Timur Tengah adalah kawasan paling berbahaya di dunia saat ini. Sedikit saja muncul gejolak, maka imbasnya bisa terasa di seluruh dunia”*. Selain konflik berkepanjangan, negara-negara di Timur Tengah yang notabene sebagai negara Arab yang memeluk agama Islam tidak bersatu untuk menyelesaikan prahara-prahara konflik. Mereka bahkan perang antar-saudara, belum lagi ada kelompok ekstrimis seperti ISIS dan kelompok fundamental lainnya, maka kondisi semacam ini di Timur Tengah yang coba dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Jadi kebijakan-kebijakan sekontroversial apapun bisa diimplementasikan oleh otoritas Amerika Serikat manakala kondisi di Timur Tengah seperti itu, termasuk dengan kebijakan memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.